

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PENDEKATAN PARTISIPATIF DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Winarendra Imam Prakoso, Ari Subowo
Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro
email: Winarendra.ip@gmail.com

ABSTRACT

The process of development planning based on participatory it's very important for the sustainability and success of a development. Tembalang Subdistrict as one of the Subdistricts which has very large area with a geographical location on the border and very large population which has an average level of low education becomes a problem. The main purpose of this research to describe or visual in detail and depth about the stages of development planning and to know what its the factors has influence the community participation in development planning in Tembalang Subdistrict, Semarang City based on Abe Alexander's 6 planning stages and 4 characteristics of participatory planning according to Wicaksono & Sigiarto . The method used in this research is a qualitative descriptive with data collection techniques used semi-structured interviews and non-participant observation and data analysis technique uses an interactive model analysis from Miles and Huberman which includes the stages of reduction, presentation and data verification. The results of this research show that in the process of development planning stages have not been implemented optimally, community participation in following the development planning process was still relatively low, there are problems related to the preparation of development planning deliberations that have not involved elements of society in general; lack of understanding of the community in determining the priority scale; distrust and openness from elites of the District and Urban Village to community proposals; and lack of time for organizing musrenbang. The recommendations generated from this research are; The Government should more active in disseminating development planning; Increase trust in community proposals; the holding of the discussion of carrying capacity in the form of potential and the addition of time to organize development planning deliberations.

Keywords: Development, Planning, Participation,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan selalu dilakukan oleh setiap negara di dunia, dewasa ini keinginan negara-negara yang sedang berkembang atau yang biasa disebut negara dunia ketiga dengan definisi *middle income countries* menggebu-gebu untuk melakukan pembangunan tidak terkecuali negara kesatuan republik Indonesia

Pembangunan sendiri bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, melalui perubahan yang dimulai dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik, dari kondisi tradisional ke kondisi yang modern, dari kondisi yang kurang layak ke kondisi yang lebih maju dan sejahtera. Selain itu di Indonesia pembangunan bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera seperti yang tertuang dalam UUD 1945

Dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan aturan main atau suatu kebijakan yang berbentuk instrument perencanaan yang di buat oleh pemerintah dan memiliki kekuatan memaksa sehingga jalannya pembangunan dapat diikuti oleh seluruh *stakeholders*. Berbicara tentang perencanaan, kita dihadapkan pada pertanyaan apakah suatu rencana berjalan dengan baik atau tidak. Kesalahan perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri ataupun pada saat proses perencanaan itu berlangsung. Banyak perencanaan pemerintah yang gagal karena apa yang direncanakan tersebut tidak mempunyai pijakan

yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pada awal perkembangannya dalam melakukan suatu perencanaan pembangunan pihak yang melakukan suatu perencanaan pembangunan hanyalah pemerintah saja, tetapi seiring dengan berubahnya paradigma fungsi pemerintah dari *government* ke *governance* maka dalam pembuatan perencanaan pembangunan diikuti oleh tiga aktor utama yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang SPPN maka sistem perencanaan telah terintegrasi dari pusat/nasional, regional/daerah maupun tingkat sektoral seperti Kecamatan, Kelurahan ataupun Desa. dengan sistem perencanaan seperti ini maka diharapkan segala permasalahan maupun potensi yang ada di pusat, regional, maupun sektoral telah terserap dengan baik. dalam SPPN dikenalkan tiga proses pendekatan perencanaan, yaitu pendekatan politik, pendekatan Teknokratis dan pendekatan partisipasi yang diharapkan semuanya berjalan tepat dan sinergis. Pada kenyataannya pendekatan partisipasi sangat sulit untuk dilakukan secara efektif padahal pendekatan partisipatif sangat penting dalam jalannya pembangunan suatu wilayah dikarenakan mayoritas yang mendapatkan dari pembangunan adalah masyarakat itu sendiri.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1992: 154) yang lebih lanjut

mengemukakan 3 alasan utama tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Pada umumnya ada kecenderungan pada pemerintah untuk melibatkan masyarakat hanya pada tahap pelaksanaan program pembangunan saja yang program tersebut telah disetujui secara informal sebelumnya oleh elit politik dan unsur. Konsep partisipasi masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan seringkali dipahami sebagai pelibatan masyarakat pada tahap pembangunan saja bukan pada tahap perencanaan. Menurut Tjahjono dkk (2014) menyebutkan bahwa “*di beberapa kasus, satu atau beberapa kelompok masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan terjadi secara pasif karena umumnya keterlibatan masyarakat hanya dilihat dari daftar absensi atau kehadiran masyarakat dalam forum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Belum ada aturan*

normatif yang mengatur hingga sejauh apa masyarakat harus terlibat dalam sebuah perencanaan pembangunan” (Riptek Vol. 10, No. 1, Tahun 2016 Hal. 115 – 128).

Sebagai salah satu ibukota provinsi di Indonesia, Kota Semarang mempunyai peran yang besar terhadap pembangunan negara Indonesia. sebagai salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yaitu provinsi Jawa Tengah Kota Semarang dibagi menjadi 12 Kecamatan dan 117 Kelurahan. Dalam proses pembangunannya Kota Semarang masing mengalami kendala dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang mengedepankan partisipasi dari masyarakat ataupun stakeholders seperti jurnal yang ditulis oleh Anggraeni dan Fitra dalam (Riptek Vol. 10, No. 1, Tahun 2016 Hal. 115 – 128) dijelaskan bahwa “*tipologi partisipasi pelaku pembangunan dalam penyusunan RPJMD Kota Semarang 2016- 2021 sampai pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Semarang 2016-2021 termasuk kedalam tipologi tokenism*”, Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi stakeholder dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan yang sudah disiapkan saja tanpa ada proses perumusan yang komprehensif oleh masyarakat ataupun *stakeholders*.

Kecamatan Tembalang sebagai salah satu Kecamatan yang berada di Kota Semarang belumlah berkembang dengan pesat di bandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di Kota Semarang, masih banyak permasalahan-permasalahan di wilayah tersebut yang menghambat perkembangan salah

satunya dikarenakan posisi Kecamatan Tembalang yang berada pada pinggiran Kota Semarang, sehingga Kecamatan Tembalang masih belum banyak arus perputaran ekonomi ataupun pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan oleh Walikota Semarang Hendrar Prihadi bahwa *“wilayah Tembalang terkhusus rowosari sebagai batas kota merupakan salah satu gerbang Kota Semarang yang harus terus terjamah pembangunan, Kota Semarang tidak cuma tengah kota saja, tetapi kawasan pinggir dan perbatasan seperti rowosari yang ada di Kecamatan Tembalang ini juga merupakan bagian dari Kota Semarang yang menjadi prioritas kami. Seluruh pembangunan wilayah dan infrastruktur ini tidak ada harapan lain kecuali adanya peran serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang ada”*. (Tanya Jawab, <http://semarangkota.go.id/berita/read/7/berita-kota/1443/walikota-jangan-ada-jalan-bubur-lagi/>, 9 November 2016)

Kecamatan Tembalang sebagai salah satu Kecamatan Pengembang yang ada di Kota Semarang dengan wilayah yang sangat luas serta jumlah penduduk yang tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan upaya pembangunan. Berdasarkan data yang di ambil dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang Tahun 2015, jumlah penduduk Kecamatan Tembalang yang menganggur sebanyak 20,479 orang laki-laki, 13,478 orang perempuan. Sedangkan yang setengah pengangguran berjumlah 31,071 orang dan

pengangguran penuh berjumlah 2,886 orang, dilihat dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekali masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tembalang yang tidak memiliki mata pencaharian tetap atau bahkan tidak memiliki mata pencaharian sama sekali.

Tabel 1.1.
Banyaknya Penduduk 5 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Tembalang Tahun 2016

No	Tahun	Tamat PT	Tamat Akademi	Tamat SLTA	Tamat SLTP	Tamat SD	Belum Tamat SD	Tidak Sekolah	Jumlah
1	2012	5,798	5,669	27,523	26,451	29,821	11,898	8,530	115,690
2	2013	5,985	5,852	28,411	27,305	30,783	12,282	8,805	119,423
3	2014	6,274	6,135	29,782	28,623	32,269	12,875	9,230	125,187
4	2015	6,362	6,220	30,198	29,022	32,719	16,112	9,359	129,992
5	2016	6,494	6,349	30,825	29,625	33,399	16,447	9,553	132,694

Sumber: Kecamatan Tembalang Dalam Angka 2017

Komposisi penduduk berdasarkan kualitas pendidikan umumnya diukur dengan jumlah penduduk yang berhasil menempuh setiap jenjang pendidikan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Semakin banyak proporsi jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan studi sampai ke jenjang SMA dan perguruan tinggi, menjadi indikasi semakin baik kualitas penduduk oleh karena itu maka akan mempengaruhi tingkat keberhasilan partisipasi dalam melakukan proses perencanaan pembangunan Kecamatan Tembalang. Dengan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan serta tingkat pendidikan yang rendah maka salah satu dampak yang terjadi adalah ketidakmampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Seperti yang disampaikan Mubiyarto (1984:

8) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yaitu: (1) Pendidikan, (2) Pendapatan, (3) Motivasi, (4) Persepsi, (5) Status sosial dan percaya diri, dan (6) Tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan tersebut maka asumsi awal peneliti adalah bagaimanakah proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tembalang, apakah proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tembalang sudah partisipatif, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian (penelitian) dengan judul “**Proses Perencanaan Pembangunan Dengan Pendekatan Partisipatif Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang**” untuk mendapatkan jawaban yang lebih tepat dan akurat sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses tahapan perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif yang dilakukan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif di Kecamatan Tembalang Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses tahapan perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipasi di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi perencanaan

partisipatif di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

D. Kerangka Teori

Manajemen Publik

Menurut Overman dalam (Pasolong, 2008:83) Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Selain itu Overman juga mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah scientific management, meskipun sangat dipengaruhi oleh scientific management. Manajemen publik bukanlah policy analysis, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi rasional instrumental pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain.

Menurut George R Terry dalam Sugandi (2011: 53-54) fungsi Manajemen terdiri dari POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*)

Sementara menurut Gullick dan Urwick dalam Sugandi (2011: 53-54) mendefinisikan fungsi dari manajemen di Administrasi Publik dapat di jabarkan menjadi PODSCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*).

Jadi, dapat dipahami bahwa manajemen publik adalah studi interdisipliner yang di dapatkan dari aspek-aspek umum manajemen dan organisasi didalam organisasi publik yang mempunyai fungsi utama yaitu

POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*) dan PODSCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*).

Pembangunan

Menurut Siagian (2008: 7) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*)

Menurut Rustiadi dkk (2011: 119-120) Pembangunan adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dan pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada, pembangunan pada dasarnya dapat dianggap sebagai proses perubahan yang disusun secara “sengaja” dan terencana untuk mencapai situasi yang salah satu sendinya terdapat proses perencanaan.

Jadi dengan kata lain pembangunan adalah suatu usaha dalam melakukan pertumbuhan dan perubahan yang secara sadar oleh suatu bangsa dan negara dilakukan dengan cara mengadakan, membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada untuk mencapai modernitas dan kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.

Perencanaan

Menurut Kuncoro (2012: 50) Perencanaan sendiri didefinisikan

sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang.

Menurut Y. Dror dalam (Kunarjo, 2002 : 41) Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Sementara menurut Arsyad dalam (Tarigan, 2010: 5) dalam perencanaan diperlukan untuk: (1) dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. (2) dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. (3) perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. (4) dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi tujuan. (5) perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.

Jadi dapat disimpulkan secara singkat perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan untuk dijadikan pedoman yang terukur dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara membuat keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan dari

berbagai alternatif berdasarkan sumber daya yang ada.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan menurut Riyadi dan Brataklusumah dalam (Khuroidah, 2012: 248) adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik

Sedangkan Menurut UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan, yaitu (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Jadi dapat disimpulkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses dalam merumuskan berbagai alternatif atau berbagai keputusan yang tersistem dan didasarkan pada data fakta yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau aktifitas yang bersifat fisik ataupun non fisik guna mencapai tujuan yang lebih baik.

Partisipatif

Menurut Sumaryadi (2010: 46) partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun

dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pengertian tentang partisipasi juga dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi dalam (Supriadi, 2001:201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Sedangkan menurut (Tilaar, 2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah suatu peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam mengenal, mengkaji dan memecahkan masalah dengan memberikan sumberdaya apapun yang dimiliki atau dapat dilakukan dan dipergunakan untuk proses perencanaan dan pembangunan.

E. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini konsep yang menjadi dasar adalah perencanaan pembangunan partisipatif dimana dalam konsep ini dijelaskan bahwa bagaimana tahapan perencanaan pembangunan yang baik dan harus melibatkan partisipasi dari masyarakat ataupun *stakeholders* baik secara langsung ataupun tidak langsung demi terselenggaranya pembangunan yang efektif di Kecamatan tembalang.

Dalam melihat proses tahapan perencanaan pembangunan yang terjadi di Kecamatan tembalang digunakan 6 tahapan perencanaan yang meliputi (1) Penyelidikan, (2) Perumusan Masalah, (3) Identifikasi Daya Dukung, (4) Perumusan Tujuan, (5) Menetapkan Langkah-langkah dan (6) Merancang anggaran yang dikemukakan oleh Abe Alexander (2002: 70-76). Sedangkan dalam melihat faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Tembalang digunakan 4 ciri perencanaan partisipatif yang meliputi (1) Kepentingan Masyarakat, (2) Partisipatoris, (3) Sinergitas dan (4) Legalitas yang di kemukakan oleh Wicaksono & Sigiarto dalam (Wijaya, 2001: 25).

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pemilihan informan melalui *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan tersebut yaitu : (1) Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, (2) Sekertaris Lurah Kelurahan

Tembalang Kota Semarang, (3) Ketua Forum LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi non-partisan di lingkungan Kecamatan Tembalang dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan teknik uji validitas data berdasarkan teknik pemeriksaan triangulasi sumber.

PEMBAHASAN

(a.) Proses Tahapan Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan tembalang

Dalam mengetahui bagaimana proses tahapan perencanaan pembangunan yang tepat di Kecamatan Tembalang Kota Semarang penulis/peneliti berpedoman dengan 6 tahapan perencanaan oleh Abe Alexander sebagai berikut:

(1) Penyelidikan

Pada pelaksanaanya proses penyelidikan yang di laksanakan di Kecamatan Tembalang dalam rangka merencanakan pembangunan dilaksanakan sebelum musrenbang Kecamatan yaitu musrenbang Kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang, tim yang di bentuk oleh Kecamatan yang terdiri dari 12 dan di bagi menjadi 2 tim mempunyai fungsi sebagai pendamping selain itu tim tersebut juga melakukan penyelidikan dengan cara menggali informasi-informasi

yang di sampaikan oleh peserta musrenbang yang ada di Kelurahan.

LPMK sebagai representatif dari masyarakat setempat juga melakukan penyelidikan yang berupa menggali informasi yang sedang berkembang di masyarakat dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya menarik masyarakat untuk di ikuti, dari kegiatan tersebut pengurus LPMK menanyakan apa saja yang sekiranya menjadi kebutuhan ataupun permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat sehingga dari informasi tersebut dapat dijadikan bahan untuk dilakukan suatu perencanaan pembangunan kedepan.

Pada hari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tembalang seluruh peserta baik dari delegasi masyarakat yang mewakili dari setiap Kelurahan sampai stakeholders yang terkait menghadiri acara tersebut guna menyampaikan apa saja yang sekiranya menjadi kebutuhan ataupun permasalahan yang sedang berkembang, dikarenakan apa yang sudah di sampaikan peserta dari delegasi di Kelurahan telah di catat dan di tampung sebelumnya oleh tim pendamping dari Kecamatan pada Musrenbang setiap Kelurahan, maka masyarakat terkhusus dari delegasi setiap Kelurahan cenderung pasif pada Musrenbang Kecamatan, hanya stakeholders yang lain yang aktif dalam menyampaikan pendapatnya.

(2) Perumusan Masalah

Dalam pelaksanaanya di Kecamatan Tembalang dalam merumuskan permasalahan yang telah di dapat dari proses penyelelidikan

sebelumnya di sesuaikan dengan tupoksi yang ada di setiap bagian di Kecamatan Tembalang agar nantinya lebih mudah untuk di identifikasi sesuai dengan permasalahan permasalahan yang berbeda seperti permasalahan kemiskinan, ataupun kesehatan, dalam perumusan masalah di pada tingkat Kecamatan hanya dilakukan oleh para pengurus Kecamatan dan Kelurahan beserta LPMK sebagai lembaga yang menjadi representatif masyarakat tanpa di ikuti oleh masyarakat secara umum dikarenakan bila dilakukan bersama masyarakat secara umum akan berjalan tidak kondusif, dan pandangan para pengurus Kecamatan, Kelurahan dan LPMK masih tidak mempercayai masyarakat dalam merumuskan permasalahan karena dianggap masyarakat masih banyak yang lebih mengedepankan subyektifitas atau mengusulkan program dan kegiatan berdasarkan keinginan saja tanpa melihat apa yang dibutuhkan.

(3) Identifikasi Daya Dukung

Dalam pelaksanaanya di Kecamatan Tembalang daya dukung yang dimiliki hanya berupa daya dukung kongkrit seperti anggaran yang didapatkan atau di jatah oleh pemerintah daerah kepada setiap Kecamatan atau OPD Teknis di Kecamatan Tembalang untuk melakukan program dan kegiatan yang akan berlangsung guna mencapai suatu pembangunan tanpa melihat dukungan potensi yang khas yang dimiliki wilayah Kecamatan Tembalang,

(4) Perumusan Tujuan

Dalam pelaksanaannya perumusan tujuan-tujuan yang dilakukan pada perencanaan pembangunan di Musrenbang Kecamatan Tembalang adalah suatu tujuan jangka pendek yaitu tahunan dengan mengikuti tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan pada tingkat atas yaitu pemerintah Kota Semarang, dalam musrenbang Kecamatan Tembalang telah ditentukan dan digolongkan kegiatan dan program apa saja berdasarkan jenis-jenisnya seperti pembangunan (fisik) sarana dan prasarana yang didalamnya meliputi infrastruktur baik itu lingkungan ataupun jalan, selain itu kegiatan non-fisik juga telah ditentukan seperti kegiatan sosial ataupun hanya kegiatan budaya.

(5) Menetapkan Langkah-langkah

Kegiatan yang hendak dilakukan, program dan kegiatan yang dihasilkan dalam proses musrenbang di Kecamatan Tembalang sudah sangat jelas dan detail apa saja program dan kegiatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan seperti pembangunan infrastruktur jalanan, sarana dan prasarana ataupun kegiatan budaya seperti wayang tertera jelas pada dokumen perencanaan, dan yang ketiga pembagian tugas atau tanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan juga telah terlampir pada dokumen perencanaan yang dihasilkan pada musrenbang Kecamatan Tembalang, dalam dokumen tersebut telah disepakati siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur seperti pengaspalan jalan, pavingisasi, betonisasi, pembangunan talud dan pembangunan

gedung-gedung sebagai sarana dan prasaran yang dalam kasus ini adalah OPD Pekerjaan Umum Kota Semarang, selain itu kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya seperti wayang di fasilitasi oleh masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang.

(6) Menentukan Anggaran

Pada pelaksanaannya dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tembalang dengan terkhusus Musrenbang Kecamatan sebagai mediana telah di hasilkan alokasi dana untuk program dan kegiatan yang ingin dilakukan dalam dokumen perencanaan dengan jumlah nominal tertentu, dari jumlah nominal tersebut juga telah diberikan keterangan siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana tersebut.

(b.) Perencanaan Partisipatif Di Dalam Pembangunan Kecamatan Tembalang

Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perencanaan yang berbasis partisipatif dalam pembangunan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang penulis/peneliti berpedoman pada 4 ciri perencanaan partisipatif dari Wicaksono & Sigiarto yang meliputi:

(1.) Fokus Kepada Kepentingan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisa, pihak Kecamatan beserta LPMK telah melakukan kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat dimulai ketika pelaksanaan musrenbang di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan tembalang dengan membuat 2 tim yang terdiri dari 16

orang dari setiap bidang atau fungsi yang ada di struktur Kecamatan Tembalang sehingga diperoleh profil masalah dan kebutuhan masyarakat, LPMK sebagai lembaga yang menjadi perwakilan dari masyarakat dalam melakukan penyelidikan yang meliputi menggali dan memperoleh informasi didapatkan dari kegiatan-kegiatan aktif tahunan yang berdasarkan anggaran 25 juta pertahun untuk setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang yang dilakkan oleh pengurus LPMK yang melibatkan masyarakat, namun masalah yang dihadapi adalah masih banyak masyarakat yang kurang paham akan urgensi dari usulan-usulan yang telah diberikan, masih ada beberapa usulan yang didasarkan atas dasar keinginan estetika semata tanpa melihat dasar kebutuhan yang riil, pada akhirnya pihak Kecamatan sebagai institusi penyelenggara mengambil suatu tindakan untuk mengalihkan usulan tersebut berdasarkan pertimbangan tersendiri yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat.

Banyak usulan-usulan yang diberikan masyarakat tidak semuanya terakomodir dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah serta masih kurang pemahannya masyarakat dalam mengidentifikasi suatu usulan berdasarkan prioritas atau urgensi yang ada oleh karena itu pihak kecamatan beserta lurah dan kasi PP dan ketua LPMK Kelurahan yang ada di kecamatan telah menentukan dan merumuskan usulan-usulan dalam tahap pra musrenbang sehingga ketika pada pelaksanaan musrenbang masyarakat hanya

langsung menerima usulan-usulan program atau kegiatan yang telah ditetapkan dan di paparkan oleh camat Tembalang.

(2.) Partisipatoris

Dalam pelaksanaannya proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tembalang teridentifikasi sebatas penentraman (placation) di mana masyarakat telah aktif dalam memberikan usulan-usulan suatu rencana program atau kegiatan tetapi dalam penentuan skala prioritasnya telah dibahas sebelumnya oleh pihak golongan elit yaitu disini pihak Kecamatan, Kelurahan dan LPMK yang ada di setiap Kelurahan di Kecamatan Tembalang. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan partisipasi yaitu :

(1.) Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan terkhusus untuk menentukan skala prioritas.

(2.) Ketidakpercayaan pihak Kecamatan terhadap masyarakat dalam menentukan skala prioritas sehingga skala prioritas telah dirumuskan dan ditentukan dalam pra musrenbang tanpa melibatkan masyarakat serta stakeholders secara umum.

(3.) kurangnya kesadaran masyarakat terkhusus dari delegasi kelurahan dalam mengikuti musrenbang kecamatan sehingga dibutuhkan suatu insentif dalam bentuk uang.

(4.) Waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan relatif pendek yaitu 2 jam sehingga tidak seimbang dengan materi yang harus dibahas dan diputuskan.

(5). Tidak terlibatnya unsur-unsur penting di dalam masyarakat seperti forum anak Kecamatan Tembalang, forum karang taruna Kecamatan Tembalang karena rendahnya keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator dari tidak berhasilnya pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kecamatan Tembalang.

(3.) Sinergitas

Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tembalang, proses pengambilan keputusan yang diselenggarakan di Kecamatan secara formal telah dilakukan dengan baik seperti halnya pertukaran informasi-informasi semata yang didapatkan antar peserta musrenbang Kecamatan tetapi hanya sebatas informasi saja tanpa ada suatu tujuan dan penetapan yang pasti.

Hasil kesepakatan peserta musrenbang kecamatan berupa daftar prioritas usulan/kegiatan kecamatan yang merupakan hasil kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi telah dibahas sebelum pelaksanaan musrenbang Kecamatan sedangkan sisanya hanya sebatas penetapan. namun pada umumnya dapat diterima peserta musrenbang khususnya dan masyarakat kecamatan Tembalang.

(4.) Legalitas

Legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat, artinya tidak hanya

berdasarkan peraturan normatif tetapi juga menjunjung etika.

Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tembalang secara umum telah mengacu pada peraturan walikota Semarang no 57a tahun 2017 seperti telah ditetapkannya 3 delegasi dari Kecamatan dan ada perwakilan dari perempuan berdasarkan berita acara, serta usulan-usulan yang telah ditetapkan dibuat berdasarkan form-form yang telah ditetapkan dalam peraturan tetapi ada beberapa hal yang belum dilaksanakan secara detail sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada peraturan tersebut dapat dilihat dari: (1) ada beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan yang tidak diselenggarakan dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan seperti dalam merumuskan dan menentukan tujuan; (2) Proses perencanaan pembangunan belum melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan; (3) Penetapan keluaran belum melibatkan peserta musrenbang secara riil dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan, karena keluaran sudah dibuat oleh pihak kecamatan berdasarkan daftar prioritas usulan/kegiatan setiap Kelurahan yang sudah masuk ke kecamatan sebelum proses perencanaan pembangunan dijadwalkan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a.) Pada proses penyelidikan pencarian dan penggalian informasi dari masyarakat yang dilakukan tim

pendamping dari Kecamatan Tembalang pada musrenbang tingkat Kelurahan terbilang cukup baik selain itu peran LPMK sebagai lembaga representatif masyarakat juga cukup baik dalam pencarian dan penggalan informasi pada masyarakat, akan tetap pada tahapan Musrenbang Kecamatan proses penyelidikan tidak berjalan efektif dikarenakan tidak ada kesempatan masyarakat dalam memberikan pendapatnya. (b). Pada proses perumusan masalah tidak dilaksanakan secara tepat dikarenakan dilakukan pada sebelum Musrenbang Kecamatan yang hanya di hadiri oleh pengurus Kecamatan, Kelurahan dan LPMK tanpa di hadiri oleh masyarakat pada umumnya yang dikarenakan ketidak percayaan pengurus dari Kecamatan dan Kelurahan khususnya kepada masyarakat karena masih ada anggapan bahwa msyarakat tidak bisa merumuskan permasalahan dikarenakan lebih mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. (c). Pada proses identifikasi daya dukung yang dilakukan di musrenbang Kecamatan masih bersifat daya dukung yang kongkrit yaitu uang, tanpa memperhatikan secara detil daya dukung yang merupakan potensi di wilayah tersebut. (d). Pada proses Perumusan Tujuan sudah berjalan baik di Musrenbang Kecamatan Tembalang, karena musrenbang Kecamatan sendiri adalah usaha untuk membahas tujuan jangka pendek yaitu tahunan yang didalamnya telah dilakukan dan ditetapkan penggolongan kegiatan dan program berdasarkan tujuan pembangunan. (e). Pada proses Penetapan langkah-langkah pada

musrenbang Kecamatan Tembalang telah berjalan cukup baik, apa yang hendak dicapai, kegiatan yang hendak dicapai dan siapa saja yang bertanggung jawab akan kegiatan dan program telah dilaksanakan akan tetapi (waktu pelaksanaan) baik itu kapan kegiatan dan program akan dilaksanakan dan kapan diselesaikan tidak dibahas pada musrenbang Kecamatan Tembalang. (f). Pada proses menentukan anggaran telah berjalan baik, pada musrenbang Kecamatan telah dibahas dan ditetapkan pengalokasian anggaran yang berupa uang sesuai dengan program dan kegiatan yang hendak akan dilakukan. (g) pada pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat Kecamatan Tembalang belum dilakukan secara terbuka dan saling percaya karena sebagian besar dalam menentukan skala prioritas tersebut telah dibahas sebelum musrenbang Kecamatan dimana hanya beberapa elit saja yang menghadiri kegiatan tersebut. (h) tingkat partisipasi belum tercapai dengan maksimal dikarenakan keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman tentang perencanaan pembangunan, ketidakpercayaan elit kelurahan dan kecamatan kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka terhadap suatu perencanaan pembangunan, tidak terlibatnya unsure-unsur organisasi penting dan waktu pelaksanaan musrenbang yang relatif singkat. (i) Perencanaan di Kecamatan Tembalang telah menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan usulan-usulan

yang telah di disampaikan pada musrenbang Kelurahan yang tidak semuanya dapat terakomodir dikarenakan adanya usulan-usulan dari Kelurahan lain yang lebih prioritas selain itu adanya interaksi saling bertukar informasi di antara stakeholders. (j) Legalitas perencanaan, dimana perencanaan pembangunan secara garis besar telah dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, tetapi masih ada beberapa hal teknis yang tidak dilakukan secara tepat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada peraturan yang ada.

Saran terhadap permasalahan pada proses perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif di Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang dapat diberikan yaitu :

(1). Perlu diadakannya sosialisasi kepada stakeholders agar menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan musrenbang di Kecamatan Tembalang dan sosialisasi pada masyarakat secara umum untuk mengetahui bagaimana menilai suatu usulan berdasarkan skala prioritas.

(2).Perlu adanya sikap percaya dari elit Kecamatan dan Kelurahan dalam pembahasan yang meliputi perumusan masalah berdasarkan usulan-usulan yang telah di berikan oleh masyarakat secara umum.

(3).Perlu adanya pembahasan daya dukung yang berdasarkan potensi yang dimiliki Kecamatan Tembalang

(4).Perlu adanya perpanjangan waktu penyelenggaraan musrenbang Kecamatan agar seluruh peserta

dapat membahas usulan-usulan secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.

Conyers, Diana. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. 1992. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fasli DJalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.

Helmi Adita Fitria dan Mega Angraeni. 2016. *Kajian Tingkat Partisipatif Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kota Semarang Yang Inklusif*. Riptek Volume 10 No. 1, 2016, hlm. 115-128.

Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Kuncoro, Mudrajat. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?*. Jakarta: Salemba Empat.

Mubiyarto. 1984. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ross, Murray G., and B.W. Lappin. 1967. *Community Organization: theory, principles and practice*

- Second Edition*. New York: Harper & Row Publishers.
- Rustiadi, Ernan, Sunsun Saefulhakim, Dyah R. Panuju. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Cresspen Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010 *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Surendi. 2016. *Wlikota: Jangan ada Jalan Bubur Lagi*, Artikel Pengamal dalam <http://semarangkota.go.id/berita/read/7/berita-kota/1443/walikota-jangan-ada-jalan-bubur-lagi/>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2017
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tilaar, HAR. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wijaya, Rina. 2001. *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gaaadjah Mada, Yogyakarta.